

SKRIPSI

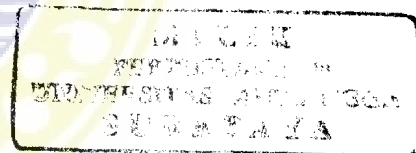
DANANG HASTUTI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA TETAP YANG
MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SECARA SEPIHAK**



OLEH

DANANG HASTUTI
030010776 - U



**FAKULTAS HUKUM - PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA TETAP YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK**

SKRIPSI

**Telah Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat –
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Pembimbing

Lanny Ramli, S.H., M.Hum

Nip. 131 878 388

Penyusun

Danang Hastuti

Nim. 030010776 U

BAB IV

Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab II, aka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu :

- A Dalam pembentukan kesepakatan kerja waktu tidak tertentu terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi. Syarat – syarat tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu harus dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;
 - b. Dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka pengusaha diberi hak untuk mengadakan masa percobaan bagi pekerja barunya itu;
 - c. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan kerja waktu tidak tertentu;
 - d. Adanya kecakapan kedua belah pihak dalam membuat kesepakatan kerja waktu tidak tertentu;
 - e. Pekerjaan yang diperjanjikan haruslah bersifat :
 1. pekerjaan itu mempunyai sifat terus menerus
 2. pekerjaan itu diperkirakan akan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya;
 3. merupakan suatu kegiatan pokok dari suatu perusahaan
 - f. Pekerjaan yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Syarat – syarat tersebut harus dipenuhi agar pekerja waktu tidak tertentu dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.

B. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja tetap apabila pengusaha meakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja tetap adalah pekerja tetap tersebut dapat menuntut pemenuhan ganti rugi dari pengusaha. Pengusaha diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pekerja sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Mengenai perselisihan hak dibidang perburuhan itu ada 2 badan atau instansi yang berwenang untuk menyelesaikannya, yaitu : Pengadilan Negeri dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Namun dalam hal itu ada 2 perbedaan yang pokok, yaitu :

1. Yang dapat menuntut di muka Panitia Penyelesaian Perseisihan Perburuhan itu hanyalah majikan dan organisasi pekerja itu tidak perseorangan, sedang di muka Pengadilan Negeri pekerja dapat mengajukan tuntutan;
2. Sanksi putusan Pengadilan Negeri adalah semata – mata sanksi perdata, sedangkan pihak yang tidak tunduk pada putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dapat pula dikenakan pidana kurungan selama – lamanya 3 bulan atau denda setinggi – tingginya sepuluh ribu rupiah.

Bagi yang berseisih itu hanya ada 2 jalan yang dapat ditempuh yaitu :

- a. menyerahkan perselisihan mereka secara sukarela kepada seorang juru atau sebuah badan atau dewan pemisah untuk diselesaikan dengan arbitrase atau;

Penyerahan perselisihan kepada juru atau dewan pemisah itu harus dilakukan dengan surat perjanjian antara kedua belah pihak yang mana dalam surat perjanjian itu diterangkan :

1. Pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang akan diserahkan kepada juru atau dewan pemisah untuk diselesaikan ;
2. Nama pengurus atau wakil serikat pekerja dan majikan serta tempat kedudukan mereka;
3. Siapa yang ditunjuk untuk menjadi juru atau dewan pemisah serta tempat tinggalnya;
4. Bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada putusan yang akan diambil oleh juru atau dewan pemisah;
5. Hal – hal yang perlu untuk melancarkan pemisahan.

Putusan dewan atau juru pemisah harus memuat :

- a. hal – hal yang termuat dalam surat perjanjian penyerahan tersebut diatas ;
- b. ikhtiar tuntutan, balasan dan penjelasan lebih lanjut leh kedua belah pihak;
- c. pertimbangan yang menjadi putusan itu;
- d. putusan pokok.

Terhadap putusan juru atau dewan pemisah dapat dimintakan pengesahan dari Panitia Pusat ini harus memberi pengesahan, kecuali :

1. jika ternyata putusan itu melampaui kekuasaan juru atau dewan pemisah;
2. di dalamnya terdapat hal – hal yang bertentangan dengan undang – undang tentang ketertiban umum atau dengan tata susila
3. di dalamnya terdapat hal – hal yang menunjukkan ihtikad yang tidak baik atau buruk..

